



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

PENETAPAN ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



DASAR HUKUM

Permenpan RB No 90
Tahun 2021

Tentang

Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah

SE Menpan RB No 15
Tahun 2022

Tentang

Pengusulan Unit Kerja
dalam Evaluasi Zona
Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)

Surat Deputi Bidang RB
No B/14/PW.00/2022

Hal

Ketentuan Tambahan
Pengusulan Unit/Satuan
Kerja Menuju WBK/WBBM

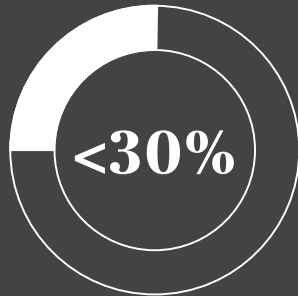


panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kriteria Batas Pengusulan Unit/Satuan Kerja

Instansi dengan Satker Berpredikat Menuju WBK/WBBM



Dapat mengajukan
satkernya untuk usulan
menuju WBK dan WBBM



Tidak perlu lagi
mengajukan usulan
menuju WBK dan WBBM

- Ketentuan mengenai hal ini akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada instansi yang telah memenuhi kriteria tersebut.
- Selanjutnya TPI instansi pemerintah yang lebih dari 30% satkernya telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM diharapkan dapat mendorong TPI pada instansi pemerintah lain dalam peningkatan kualitas pembangunan ZI.

MEKANISME PEMBANGUNAN ZI

Tahap I

Pencanangan ZI

1. Deklarasi oleh pimpinan
2. Penyebaran informasi

Tahap II

Penetapan Unit Kerja

1. Pemilihan unit kerja sesuai kriteria
2. Menetapkan unit kerja

Tahap III

Pemb Unit Kerja

1. Tim kerja ZI unit kerja
2. Program kerja dan inovasi ZI
3. Monev dan survey mandiri
4. Manajemen komunikasi

Tahap IV

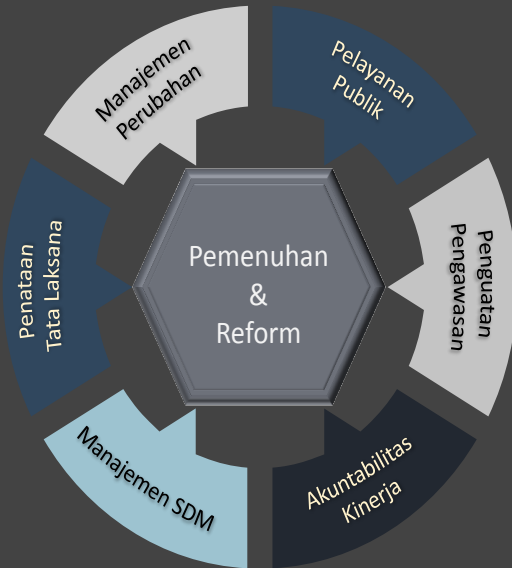
Pemantauan Pembangunan ZI

Pendampingan oleh Tim Penilai Internal (TPI) sebagai konsultan dan fasilitator

KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI

KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)

KOMPONEN HASIL (40%)



Pemerintahan
yang Bersih dan
Akuntabel

1. Survey Persepsi Anti Korupsi
2. Capaian Kinerja



Pelayanan Publik
yang Prima

Survey persepsi
Pelayanan Publik



YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGGAJUAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK/WBBM

		WBK	WBBM
Syarat Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian	
	Predikat SAKIP	Min. B	Min. BB
	Indeks RB	<input type="checkbox"/> Min CC untuk Pemda <input type="checkbox"/> Min B untuk K/L	<input type="checkbox"/> Min. B untuk Pemda <input type="checkbox"/> Min. BB untuk K/L
	Maturitas SPIP	Min. Level 3	
Syarat Tingkat unit kerja/satuan kerja	Karakteristik	<input type="checkbox"/> Merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya <input type="checkbox"/> Memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat ttg kualitas birokrasi	
	Kepatuhan	<input type="checkbox"/> Penyelesaian TLHP dari APIP/BPK telah 100% <input type="checkbox"/> LHKASN dan LHKPN telah 100%	
	Periode Pembangunan	Telah melakukan pembangunan WBK Min. 1 Tahun	Telah melakukan pembangunan WBBM Min. 1 Tahun
	Predikat SAKIP Internal	Min. B	Min. BB

Syarat Penetapan Unit Kerja / Satuan Kerja Menuju WBK/WBM

Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

ATURAN BARU TERKAIT JENIS CORE LAYANAN TEKNIS YANG DIUSULKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA

01

Layanan
Kependudukan
Dan Catatan Sipil

02

Layanan
Kesehatan

03

Layanan
Pendidikan

05

Layanan
Perijinan

04

Layanan Pajak
Daerah



PENGUSULAN ZI MENUJU WBK/WBBM

Dilakukan melalui
www.pmpzi.menpan.go.id mulai tgl
30 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022

Dokumen yang Dibutuhkan (Input ke Web PMPZI)

1. Surat Pimpinan Instansi Pemerintah

Lengkap dengan informasi hasil penilaian dari tim TPI

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pernyataan bahwa semua data dan informasi sesuai fakta yg ada dan telah dikerjakan selama 1 tahun

3. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) TPI

Dan data dukung unit/satuan kerja yg disampaikan melalui app pmpzi.menpan.go.id

4. Pengumpulan Data Dukung

Dilakukan melalui Gdrive atau link data (KemenPanRB tidak menerima pengusulan manual / hardcopy)



TUGAS TPI

1. Evaluasi terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja / satuan kerja

2. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja / satuan kerja atas pembangunan ZI

3. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan Menuju WBK/WBBK kepada TPN

4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM dan melaporkannya ke kementerian PANRB

Yang Harus Diperhatikan TPI Saat Evaluasi Internal

1

Memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah selesai 100%

2

Memastikan hasil evaluasi SAKIP minimal B u/ menuju WBK & BB u/ menuju WBBM

3

Memastikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN

4

Komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI

5

Kualitas implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung pengungkitnya

6

Inovasi - inovasi yang telah dilakukan o/ unit kerja/satuan kerja

7

Menentukan penilaian dari hasil survey yang didapat

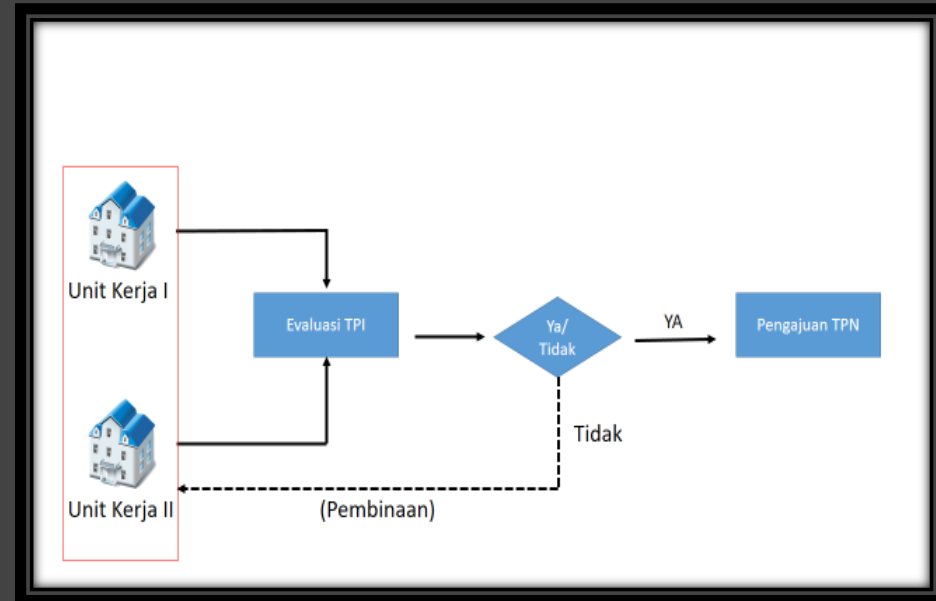
8

Capaian kinerja dari unit kerja/datuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Mekanisme Penilaian Internal Pada Pemerintah Daerah

Evaluasi Oleh TPI

1. Bagi pemerintah daerah yang unit kerja/satuan kerja telah membangun ZI, maka unit yang telah membangun ZI akan dilakukan evaluasi oleh TPI. Selanjutnya TPI memastikan bahwa unit telah membangun ZI sesuai kriteria pengungkit dan hasil pembangunan ZI;
2. TPI melakukan evaluasi dengan menggunakan LKE sebagai alat bantu evaluasi dan apabila telah selesai melakukan evaluasi, maka TPI menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah unit kerja/satuan kerja memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh TPI kemudian disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.



Bobot Penilaian Evaluasi ZI

Komponen Pengungkit

Dalam komponen pengungkit terbagi menjadi 2 (dua) kriteria penilaian, yaitu

1. Pemenuhan (berupa pertanyaan yang sifatnya pemenuhan dan sesuai dengan LKE pada peraturan sebelumnya) dan
2. Reform (berupa pertanyaan yang menggambarkan perubahan di enam area pengungkit)

Bobot terbagi masing-masing 50 persen (50%) dari bobot per komponen pengungkit.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT PEMENUHAN DAN REFORM	BOBOT (60%)	PEMENUHAN (50%)	REFORM (50%)
1	Manajemen Perubahan	8%	4%	4%
2	Penataan Tata Laksana	7%	3,5%	3,5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	5%	5%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5%	5%
5	Penguatan Pengawasan	15%	7,5%	7,5%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	5%	5%

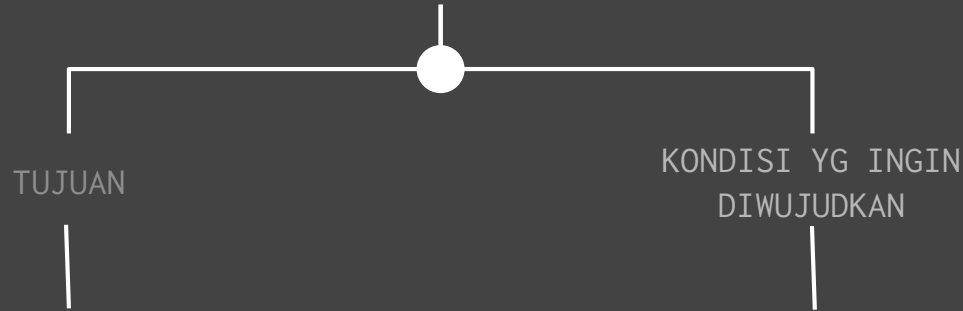
Bobot Penilaian Evaluasi ZI

Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan gambaran pencapaian atas sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
Birokrasi Yang Bersih & Akuntabel (22,50%)		
1	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50%
2	Capaian Kinerja	5,00%
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50%)		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	17,50%

Manajemen Perubahan



Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN

1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
2. Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan.
3. Terimplementasinya core value ASN BerAKHLAK

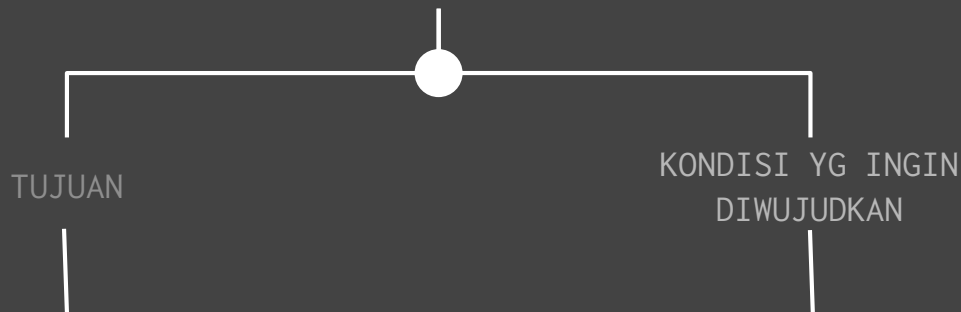
PEMENUHAN

1. Tim kerja ZI
2. Rencana Pembangunan ZI
3. Pemantauan dan Evaluasi ZI
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

REFORM

1. Komitmen Dalam Perubahan
2. Komitmen Pimpinan
3. Membangun Budaya Kerja

Penataan Tata Laksana



Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
3. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

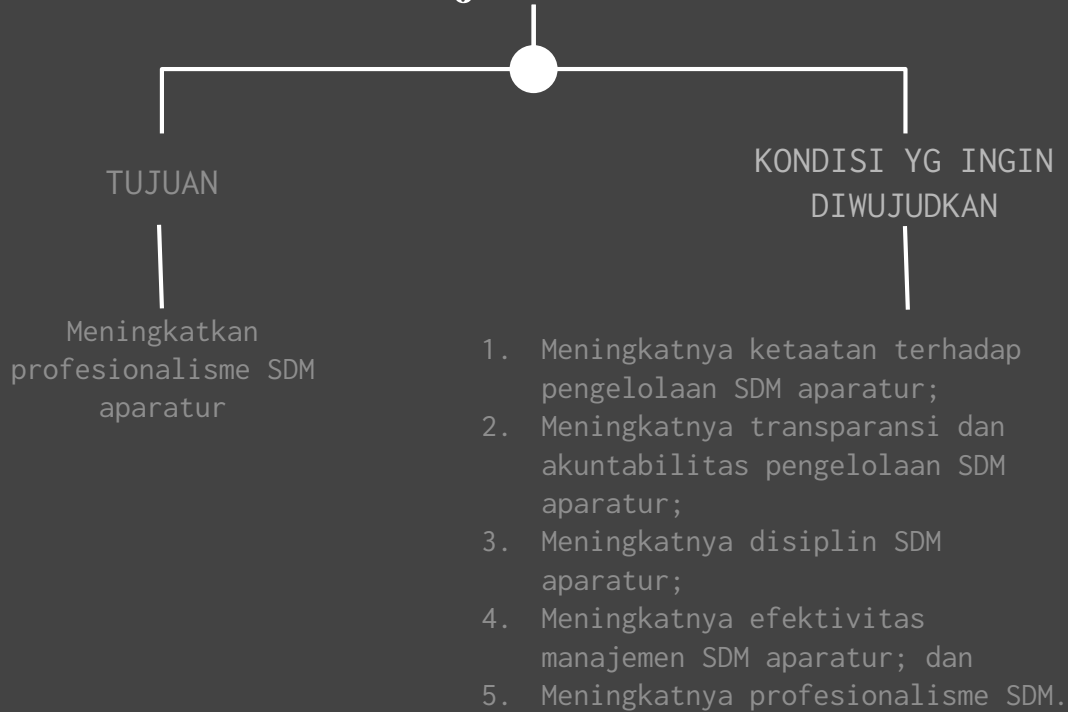
PEMENUHAN

1. SOP Kegiatan Utama
2. Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik
3. Keterbukaan Informasi Publik

REFORM

1. Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Peta Proses Bisnis
2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

Penataan Manajemen SDM



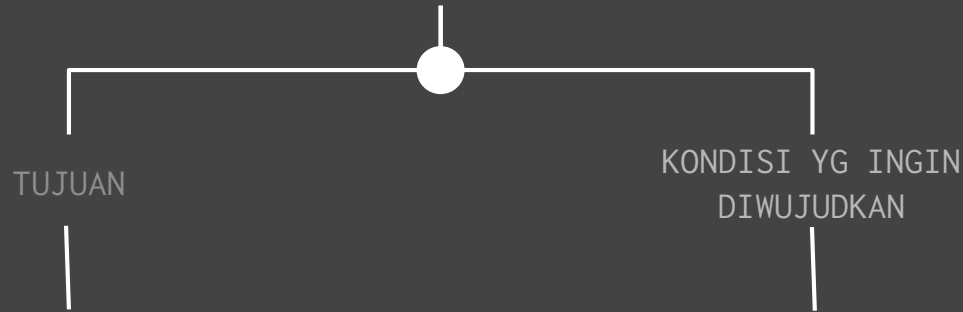
PEMENUHAN

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
3. Penetapan Kinerja Individu
4. Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik

REFORM

1. Kinerja Individu
2. Assesment Pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai

Penguatan Akuntabilitas



Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PEMENUHAN

1. Keterlibatan Pimpinan
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

REFORM

1. Meningkatnya Capaian Kinerja
2. Pemberian Reward dan Punishment atas Dasar Kinerja
3. Kerangka Logis (Penjabaran Kinerja)

Penguatan Pengawasan

TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

KONDISI YG INGIN DIWUJUDKAN

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
3. Meningkatkan sistem integritas.

PEMENUHAN

1. Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Pengaduan Masyarakat
4. WBS
5. Penanganan Benturan Kepentingan

REFORM

1. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai

Pelayanan Publik

TUJUAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

KONDISI YG INGIN DIWUJUDKAN

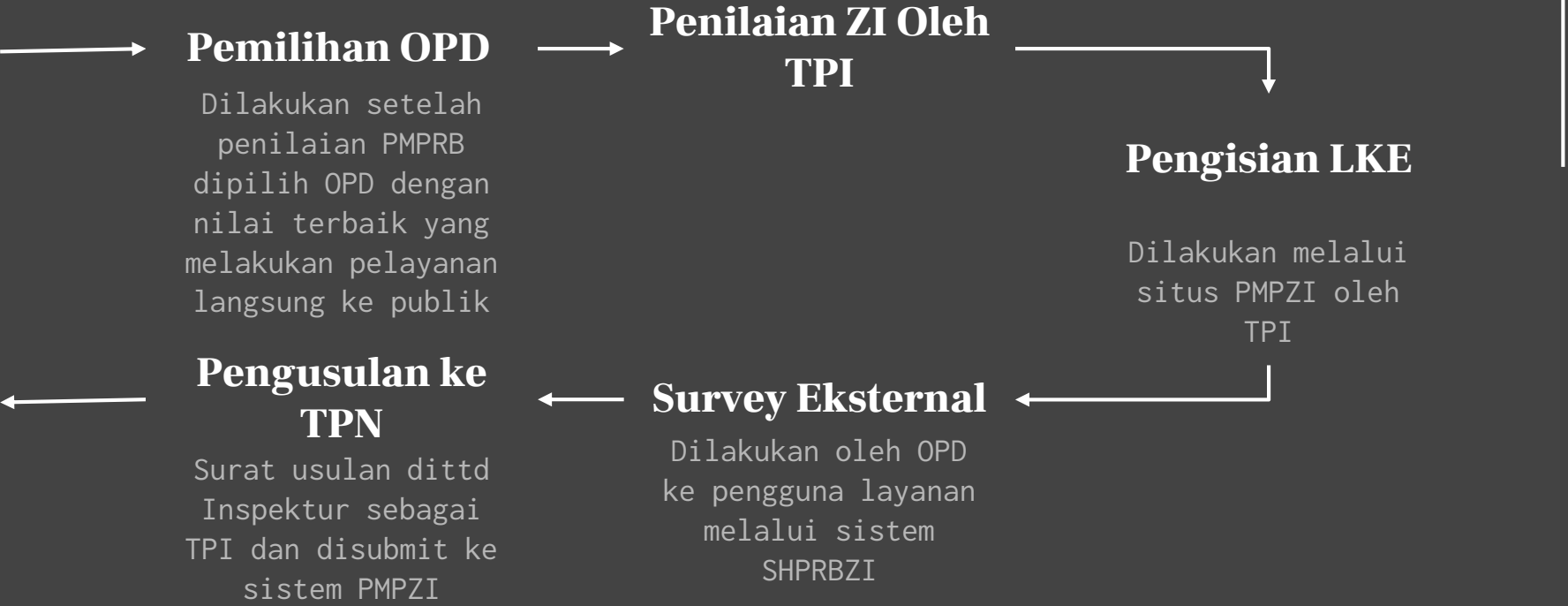
PEMENUHAN

1. Standar Pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima
3. Pengelolaan Pengaduan
4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
5. Peningkatan TI

REFORM

1. Upaya dan Inovasi Telah Mendorong Perbaikan Pelayanan Publik
2. Upaya dan Inovasi Pada Perizinan/Pelayanan Telah Dipermudah
3. Penanganan Pengaduan Pelayanan

Proses Pemilihan Unit Kerja Menuju WBK & WBBM di Pemkot Yogyakarta Tahun 2021





**TERIMA
KASIH**